

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung mengenai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada setiap tingkatan sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, pada tingkat Musyawarah RT (Rembuk RT) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 yang bertempat di Masjid Al Ikhlah, didalam proses pelaksanaan Rembuk RT disini menghadirkan perwakilan dari warga masyarakat seperti pengurus dari masing-masing RT, Ketua Karang Taruna, dan Linmas. Setiap masing-masing RT memiliki usulan prioritas program yang ingin di selenggarakan, hasil usulan dari Rembuk RT yaitu rata-rata mengusulkan Pengaspalan jalan lingkungan Gang, penerangan jalan lingkungan gang dan pemasangan cermin tikungan. Setelah dilakukannya Rembuk RT, hasil usulan selanjutnya dibawa untuk diusulkan pada pelaksanaan Musyawarah RW (Rembuk RW) kemudian Musrenbang tingkat Kelurahan. hal ini menyebabkan jika dilihat dari teori delapan (8) tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein, Rembuk RT yang dilakukan di Kelurahan Dago berada di tingkat pada tingkat "*Tokenism*" yaitu *Placation*. Hal ini dapat dinyatakan seperti ini karena masyarakat Kelurahan Dago sudah mengetahui pembangunan apa yang sedang berjalan di lingkungannya dan sudah diberikan hak untuk mengeluarkan kritik dan saran didalam kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan namun masyarakat sendiri tidak yakin 100% jika kritik dan saran itu akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan/pemerintah daerah didalam penentuan keputusan akhir.

Kemudian pada pelaksanaan Musyawarah RW (Rembuk RW) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 yang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Dago, didalam proses pelaksanaan Rembuk RW disini menghadirkan perwakilan dari warga masyarakat seperti pengurus dari masing-masing RW, Ketua Karang Taruna, dan. Setiap masing-masing RW memiliki usulan prioritas program yang ingin di selenggarakan, hasil usulan dari Rembuk RW yaitu mengusulkan program pembangunan yang fokus terhadap isu infrastruktur, isu sosial dan isu ekonomi. Setelah dilakukannya Rembuk RW, hasil usulan selanjutnya dibawa untuk diusulkan pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan. Hal ini menyebabkan jika dilihat dari teori delapan (8) tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein, Rembuk RT yang dilakukan di Kelurahan Dago berada di tingkat pada tingkat "*Tokenism*" yaitu *Placation*. Hal ini dapat dinyatakan seperti ini karena masyarakat Kelurahan Dago sudah mengetahui pembangunan apa yang sedang berjalan di lingkungannya dan sudah diberikan hak untuk mengeluarkan kritik dan saran didalam kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan namun masyarakat sendiri tidak yakin 100% jika kritik dan saran itu akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan/pemerintah daerah didalam penentuan keputusan akhir.

Selanjutnya pada pelaksanaan forum Musrenbang tingkat Kelurahan Dago bahwa partisipasi masyarakat didalam kegiatan ini sudah cukup baik karena telah menghadirkan perwakilan dari masyarakat dan mengusulkan cukup banyak usulan program pembangunan yang telah diperoleh sebelumnya pada Rembuk Warga RW. Namun tidak dapat diyakinkan 100% bahwa kritik dan saran yang mereka usulkan didengar maupun dipertimbangkan didalam penentuan keputusan akhir dari Musrenbang tingkat Kelurahan Dago tahun 2019. Didalam delapan (8) tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein yang sudah dideskripsikan didalam analisis data

pada bab iii. Dengan itu, dapat dinyatakan bahwa Musrenbang tingkat Kelurahan Dago yang diselenggarakan pada Rabu, 30 Januari tahun 2019 berada pada tingkat "Tokenism" yaitu *Placation*. Hal ini dapat dinyatakan seperti ini karena masyarakat Kelurahan Dago sudah mengetahui pembangunan apa yang sedang berjalan di lingkungannya dan sudah diberikan hak untuk mengeluarkan kritik dan saran didalam kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan namun masyarakat sendiri tidak yakin 100% jika kritik dan saran itu akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan/pemerintah daerah didalam penentuan keputusan akhir.

## 6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, maka dari itu peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut diantara lain sebagai berikut :

1. Dalam setiap proses pelaksanaan Musrenbang untuk pihak terkait pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Dago untuk lebih memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan Musrenbang. Serta pemerintah kelurahan harus bisa lebih pro aktif dalam mendorong keikutsertaan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Serta melakukan evaluasi terkait penyebab keengganan masyarakat di Kelurahan dago dalam melaksanakan Musrenbang.
2. Pada serangkaian pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Dago, selain karena alasan kurang berjalannya proses komunikasi dengan baik, timing yang kurang tepat karena adanya tumpang tindih program, juga disebabkan oleh kurangnya arahan yang diberikan oleh pemerintah, mengingat selama ini program-program yang sudah berlangsung mayoritas bersifat *top down*, sehingga instruksi dan kejelasan komunikasi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program. Mereka menilai bahwa agar pelaksanaan mengatakan berjalan dengan efektif, perlu diupayakan untuk selalu berpedoman pada tata cara pelaksanaan yang telah

ditentukan. Hal tersebut memerlukan konsistensi di dalam penyampaian sosialisasi oleh Lurah agar tidak menimbulkan kebingungan di dalam pelaksanaannya.

3. Pemerintah Kelurahan Dago perlu meningkatkan kinerja aparatnya dalam hal persiapan sosialisasi mengenai program-program Pemerintah Kota Bandung yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sehingga masyarakat bisa mengetahui program apa yang bisa diprioritaskan untuk tahun berikutnya. Dan perlunya perekrutan dan pelatihan kader pembangunan di tingkat Kelurahan maupun di tingkat RT/RW . sehingga melalui kehadiran mereka masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing
4. Untuk pemangku kepentingan yang ada di Kelurahan Dago agar mendengarkan aspirasi atau kritik dan saran yang diajukan oleh perwakilan warga maupun kelompok Lembaga masyarakat yang ada di struktur organisasi Kelurahan Dago. Sehingga dapat mewujudkan pembangunan daerah yang bersifat bottom-up yang berada di tingkat *citizen power* atau yang disebut kekuasaan masyarakat dalam delapan tangga partisipasi masyarakat menurut Arnstein, karena didalam tingkatan ini kelompok masyarakat memiliki pengaruh didalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (*Partership*) dengan memiliki akses tawar-menawar atau negosiasi didalam penentuan keputusan akhir dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan Dago.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad Mustanir, P. A. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Politik Profetik, Volume 5 No.2*, Hlm 1-2.
- Chambers, R. (2015). Dalam *Ideas For Development* (hal. Hal. 106). London: Earthscan.
- Didi Prayitno, Wahyu Pujoyono, Hardi Warsono. (2009). Analisis Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. *Jurnal Ilmu Adiministrasi dan Kebijakan Publik*, 13-14.
- Dill, B. (2009). The Paradoxes of Community-based Participation in Dar es Salaam. *Development and Change*, 720.
- Dr. I.Nyoman Sumaryadi, D. M. (t.thn.). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Drs. Abu Huraerah, M. (2011). *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Haryadi, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan bangunan. *Jurnal Katalogis Vol.4*, 172.
- Huraerah, A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Manajemen Pembangunan*, 95-115.
- Mikkelsen, B. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Riedel Legi, W. Y. Rompas,msi , Jericho d. Pombengi. (2015). Implementasi Pendekatan Bottom-up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaen Kabupaten Minahasa Selatan. 2-13.
- Taylor, S. J. (2015). *Introduction to Qualitative Research Methods*. United States of America: Wiley.
- Totok Mardikanto, P. S. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Pemukiman. *Jurnal ComTech Vol.4*, Hal. 27.

## **DOKUMEN**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rembuk Warga tingkat RT/RW

Dokumen Daftar Hadir Rembuk Warga Tingkat RT/RW Kelurahan Dago

Dokumen Kelurahan Dago

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rembuk Warga tingkat Kelurahan Dago

Dokumen Daftar Hadir Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Dago

Laporan Penduduk Kelurahan Dago